



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKRDITAB RAKYAT

TESIS



**YOSEP HADI PURA
1021211019**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2013**



No. Alumni Unand

YOSEP HADI PUTRA

No. Alumni Pascasarjana

BIODATA

a) Tempat/Tanggal lahir: Padang/4 September 1988 b) Nama Orang Tua: Akhiruddin dan Bahniar c) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas d) Program Studi Ilmu Hukum e) No. BP: 1021211019 f) Tanggal Lulus: 7 Juni 2013 g) Predikat Lulus: Memuaskan h) IPK: 3,45 i) Lama Studi: 2 Tahun 9 Bulan j) Alamat: Jl. Dr. M. Hatta No. 69 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang-Sumatera Barat.

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Tesis S2 oleh : Yosep Hadi Putra, SH
Pembimbing: 1. Dr. Busyra Azheri, SH., MH
2. Ulfanora, SH., MH

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu Bank yang mempunyai pengaruh dalam perekonomian Nasional. Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai Bank yang baru berkembang dan mempunyai prospek yang bagus dalam sistem perbankan Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat ini masih mempunyai kekurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Diantaranya masih kurangnya bentuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga menimbulkan resiko yang dapat merugikan Bank Perkreditan Rakyat Itu sendiri. Selain itu dapat menjadi target para pelaku kejahatan di bidang ekonomi perbankan. Untuk mengurangi resiko di atas, maka perlu diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Demikian pentingnya kegunaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, maka Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang masih berkembang di Sumatera Barat, perlu Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut untuk menunjang dan menciptakan sektor perbankan yang sehat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan Apakah hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian menerangkan dan memaparkan objek yang diteliti secara objektif tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan atau data-data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer, artinya penelitian ini melihat bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan disesuaikan dengan data yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melalui proses prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring terhadap nasabah dan pelaporan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Akan tetapi, dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang masih terdapatnya kekurangan, hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah secara menyeluruh yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 yang mewajibkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Kata kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, BPR Cincin Permata Andalas Padang

Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Juni 2013.

Disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Nama Terang	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH.	Ulfanora, SH., MH.	Dr. Herdi, SH., MH.	Dr. Dahlil Mardjon, SH., MH.	Yoserwan, SH., MH., LLM.

Mengetahui:

Ketua Program Studi: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH
NIP. 196006251986031003

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Pascasarjana/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Program Pascasarjana/Universitas	
No. Alumni Pascasarjana:	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

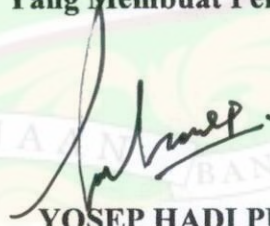
Nama Mahasiswa : YOSEP HADI PUTRA

No. Buku Pokok : 1021211019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan Judul:
**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK
PERKREDITAN RAKYAT.** Adalah hasil kerja/karya sendiri bukan merupakan
jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya
dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status
kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 7 Juni 2013
Yang Membuat Pernyataan



YOSEP HADI PUTRA
NO. BP. 1021211019

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

**(Nama: Yosep Hadi Putra, 1021211019, Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 + x halaman, Tahun 2013)**

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu bank yang mempunyai pengaruh dalam perekonomian nasional. Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai bank yang baru berkembang dan mempunyai prospek yang bagus dalam sistem perbankan Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat ini masih mempunyai kekurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Diantaranya masih kurangnya bentuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri. Selain itu, dapat menjadi target para pelaku kejahatan di bidang ekonomi perbankan. Untuk mengurangi risiko di atas, maka perlu diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Demikian pentingnya kegunaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, maka Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang masih berkembang di Sumatera Barat, perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut untuk menunjang dan menciptakan sektor perbankan yang sehat. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan Apakah hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian menerangkan dan memaparkan objek yang diteliti secara objektif tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan atau data-data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer, artinya penelitian ini melihat bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan disesuaikan dengan data yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara serta di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melalui proses prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring terhadap nasabah dan pelaporan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Akan tetapi, dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang masih terdapatnya kekurangan. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah secara menyeluruh yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010, yang mewajibkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Kata kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, BPR Cincin Permata Andalas Padang

THE APPLICATION OF KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE IN BANK PERKREDITAN RAKYAT

**(Name: Yosep Hadi Putra, 1021211019, Science of Law Master Program
Faculty of Law Andalas University, 97 + x pages, 2013)**

ABSTRACT

Bank Perkreditan Rakyat is a bank that has an influence in national economy. Bank Perkreditan Rakyat can be regarded as a new evolve bank and it has the good prospects in Indonesian banking system. But, Bank Perkreditan Rakyat still has the deficiency in its business activities. For the example, there is a deficiency of know your customer principle, and it will give risks that can detrimental the bank itself. Moreover, it can be a target of crimes in the field of economic banking. To reduce the risk above, it is necessary to apply the know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat, as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 12/20/PBI/2010. The know your customer principle is really important. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, which is still growing in West Sumatra, have to apply the know your customer principle to support and create a good banking sector. The problems that will be discussed in this thesis is How the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang and What the constraints faced is in the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. This research is a descriptive study which is mean that it explains and describes the objects studied objectively about the application of know your customer principle. As a law research, the approach that used in this study is the empirical law research which is a research that uses secondary materials or data as initial data, then followed by primary data, which is mean that this studies looked at how the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, and adapted to the data that found in the field. The Data is collected by the study of documents and interviews and analyzed by qualitative methods. The results show the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang through customer acceptance procedure, customer identification, monitoring and reporting on the application of you're your customer principle. However, the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang still has a deficiency, it is because there is no application of know your customer principle overall in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 12/20/PBI/2010 which requires the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat and Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Key words: Know Your Customer Principle, BPR Cincin Permata Andalas Padang

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kelapangan hati dan pikiran sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT". Adapun Tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Seiring dengan itu, shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pengemban amanah dan risalah Islam yang memberikan ilmu kepada umatnya dengan ikhlas dan sabar.

Selama penulisan Tesis ini, banyak pihak yang ikut memberikan bantuan berupa motivasi, semangat dan saran serta dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis. Karena itu, Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yakni Ayah AKHIRUDDIN dan Umak BAHNIAR yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta kepada adik-adikku Yosi Meidiawati dan Gusrinedi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan. Seperti kata pepatah "Tak ada gading yang tak retak". Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, Wakil Dekan I Bapak Dr. Ferdi, SH., MH, Wakil Dekan II Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M. Hum.
2. Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Zainul Daulay, SH., MH sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH beliau adalah Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama bimbingan. Selanjutnya, kepada Ibu Ulfanora, SH., MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang juga sangat banyak membantu penulis beserta nasehat-nasehat yang telah diberikan.
5. Seluruh Tim Penguji Ujian Akhir Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH., Bapak Dr. Busyra Azheri., SH., MH., Ibu Ulfanora, SH., MH., Bapak Dr. Ferdi, SH., MH., Bapak Dr. Dahlil Mardjon, SH., MH., dan Bapak Yoserwan., SH., MH., LL.M., terima kasih atas segala saran dan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Karyawan dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu Bapak Jalius Raden, SE yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
9. Teman-teman Angkatan 2010/2011 Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memotifasi serta memberikan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berserah diri kepada Allah SWT dan berdo'a semoga semua bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak kepada penulis mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa yang akan datang.

Padang, Juni 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	18
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	25
1. Perkembangan dan Pengertian Bank	25

2. Jenis-jenis Bank	30
3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	36
3.1 Asas Perbankan	36
3.2 Fungsi dan Tujuan Perbankan	39
B. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat	40
1. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	43
2. Operasional dan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	46
3. Kredit Sebagai Produk Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat	56
C. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah	59
1. Pengertian dan Tujuan Prinsip Mengenal Nasabah	59
2. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah	61
3. Pengaruh Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>) Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang	66
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>) Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Perbankan	43
---------	------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata

Andalas Padang 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional.¹ Sejalan dengan pernyataan tersebut, sektor perbankan merupakan bagian dari dunia bisnis, perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi sektor perbankan sebagai pendukung kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan kebijakan kemoneteran yang nantinya bertujuan untuk mencapai adanya kenormalan dalam suatu sistem keuangan.

Perbankan di Indonesia memiliki unsur kesamaan dengan perbankan yang berlaku pada negara-negara lainnya di dunia. Akan tetapi, perbankan di Indonesia memiliki suatu corak yang khas. Hal ini dipengaruhi oleh Ideologi Pancasila dan Tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya. Adapun kekhasan perbankan di Indonesia, antara lain:²

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan

¹ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan hal di atas, saat ini Indonesia telah memiliki landasan hukum di bidang perbankan yaitu dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada saat ini, perbankan tidak hanya di anggap sebagai lembaga yang mempermudah dalam lalu lintas jasa keuangan saja, tetapi pada sisi lainnya sektor perbankan secara general mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Perbankan ini juga mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan dalam dunia perbankan di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diperinci secara yuridis apa saja kegiatan bank yang diperkenankan.

Berdasarkan pengertiannya secara umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Sedangkan menurut G. M. Verryo Stuart, dalam bukunya *Bank Politik*, dinyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar yang baru berupa uang giral.⁴

Apabila dilihat dari jenis bank berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan antara lain:⁵

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1986 tentang Bank Sentral, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998).
3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998).
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan jenis-jenis bank yang dikelompokkan sesuai fungsinya ini dapat disimpulkan bahwa, terdapat penggolongan kinerja bank dalam

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴ Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 8.

⁵ Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 55-56.

melaksanakan fungsinya, walaupun secara general bergerak dalam jasa lalu lintas keuangan.

Dari beberapa pengertian bank di atas, dapat dilihat bahwasanya bank itu merupakan suatu badan usaha atau sebuah perusahaan yang lebih memfokuskan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang juga disebut sebagai pihak-pihak yang membutuhkan dana, penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan ini dapat berupa kredit dan jasa dalam lalu lintas keuangan.

Dengan melihat peranan dari sektor perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat.⁶ Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor perbankan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas perekonomian negara, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya suatu sistem perbankan yang sehat maka akan berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara tersebut.

Artinya, dengan semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh perbankan dalam jasa lalu lintas keuangan, serta tingginya upaya untuk meningkatkan kesehatan di bidang perbankan, membuat banyak peluang untuk terjadinya suatu tindakan kejahatan di bidang ekonomi khususnya pada sektor perbankan. Kejahatan di bidang perbankan ini dapat terjadi karena kelalaian pihak perbankan dalam melaksanakan peraturan tentang perbankan

⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 5.

sebagaimana mestinya dan adanya suatu i'tikad buruk dari nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya.⁷ Untuk menanggulangi hal ini sangat diperlukan suatu upaya yang sangat ekstra oleh perbankan, yaitu berupa pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Dalam hubungannya dengan doktrin *prudent banking* ini, terdapat suatu persinggungan yuridis dimana di satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank-bank dapat melakukan kegiatan secara *prudent* dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*.⁸

Kegiatan bank harus *safe* artinya perbankan dalam melakukan kegiatannya tidak boleh membawa risiko yang substansial (*substantive risk*) dan bersifat spekulatif. Sedangkan kegiatan bank yang harus bersifat *sound* mempunyai maksud bahwa, kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank yang berarti bank tidak boleh melaksanakan bisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.⁹

Dalam sistem perbankan di Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan kausalitas antara suatu bank dengan nasabah, karena perbankan dengan nasabah adalah suatu kesatuan yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi mempunyai pengaruh yang sama terhadap jasa lalu lintas keuangan. Dari segi kaca mata hukum, hubungan antara nasabah dan bank

⁷ <http://www.HukumOnline>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2012.

⁸ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

⁹ *Ibid.*

terdiri dari 2 bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.¹⁰

Hubungan bank dengan nasabah berdasar kontraktual maksudnya hubungan yang diawali dengan suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara bank dengan nasabah yang nantinya mengikat kedua belah pihak dan kontrak tersebut merupakan Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berlaku sebagian besar terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur- non deposan.

Sejalan dengan itu, konsekuensi perbankan dalam menjalankan fungsinya terdiri dari 2 hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara bank sebagai debitur dan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur berupa perjanjian penyimpanan (perjanjian simpanan) dana. Setelah itu, hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penyimpan dana sebagai debitur berupa perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasar prinsip syariah).¹¹ Sedangkan, hubungan non kontraktual di Indonesia agak kurang di akui.

Hubungan antara nasabah dengan bank yang dilakukan secara kontraktual dapat memberikan suatu kepastian hukum, dimana dengan adanya hubungan nasabah dengan bank secara kontraktual ini secara otomatis dapat mempermudah terlaksana prinsip kehati-hatian bank (*prudential*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 100.

¹¹ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 242.

banking) dan penerapan dari *Know Your Customer Principle* atau Prinsip Mengenal Nasabah.

Akan tetapi, majunya teknologi dan globalisasi ekonomi ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Hal ini didasari dengan semakin terbukanya sistem ekonomi negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Keterbukaan sistem perekonomian negara berkembang memberikan peluang dan celah yang besar masuknya arus dana dari negara-negara maju.

Peluang besar tersebut juga mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya suatu kejahatan di bidang ekonomi bertaraf Internasional dengan memanfaatkan celah yang ada dalam globalisasi ekonomi dan teknologi. Semua celah kejahatan ekonomi yang terdapat dalam globalisasi ekonomi dan teknologi ini memberikan ancaman yang sangat serius pada perbankan Indonesia tidak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagaimana diketahui, Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang dapat dikatakan baru berkembang dan mempunyai prospek yang sangat bagus dalam sistem perbankan Indonesia. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat ini masih menyisakan kekurangan-kekurangan diantaranya masih minimnya bentuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga menjadi target para pelaku kejahatan di bidang ekonomi perbankan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Halim yang menyebutkan bahwa, salah satu kejahatan ekonomi perbankan berupa praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak hanya mengancam Bank Umum yang telah memiliki produk layanan yang kompleks serta bentuk keamanan yang ketat, nasabah yang banyak dan transaksi bernilai besar. Namun, praktek ini juga bisa mengancam Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki produk sederhana dan nilai transaksi relatif kecil.¹²

Pendapat Halim berarti bahwa, terdapat ancaman yang dapat berdampak negatif terhadap Bank Perkreditan Rakyat, sehingga diperlukannya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara maksimal dan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata dengan mengabaikan prinsip tersebut. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat juga mempunyai tujuan yang sama pada perbankan secara umumnya, yaitu untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan sektor perbankan. Penerapan dari prinsip ini juga dapat memberikan gambaran terhadap perkembangan Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri, serta sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang mengharuskan perbankan secara umumnya dan Bank Perkreditan Rakyat khususnya untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your*

¹² <http://www.HukumOnline.com>, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2012.

Customer Principle). Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian secara internal maupun eksternal pada Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah menciptakan aturan baku tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Lahirnya Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum serta menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat ini juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul suatu waktu.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang masih berkembang di Sumatera Barat saat ini, sangat penting untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang bertujuan untuk memberikan dan mencapai tujuan hakiki dari perbankan yaitu menciptakan sektor perbankan yang sehat dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka menjadi suatu daya tarik bagi penulis untuk memilih topik ini sebagai suatu karya tulis dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dilakukannya penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas serta guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Tujuan lain penelitian ini yaitu sesuai dengan kerangka dasar rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengungkapkan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
2. Untuk mengungkapkan apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada perbankan antara lain dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu perspektif baru dalam pengkajian terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya, maupun di bidang hukum keperdataan dan perbankan khususnya.
- c. Dapat menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan atau manfaat bagi dunia perbankan terutama pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

a. Teori *Prudential Banking*

Prudential Banking sering disebut juga dengan kehati-hatian dalam dunia perbankan. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹³ Prinsip kehati-hatian ini diwujudkan dalam bentuk penerapan yang konsisten serta berdasarkan i'tikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan.

Dalam menunjang dan memaksimalkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perbankan terdapat beberapa pedoman dan acuan yang digunakan, pedoman tersebut dikenal dengan formula 4P dan 5C, yang terdiri dari:¹⁴

1) *Personality*

Personality ini berintikan bahwa, perbankan dalam memberikan produknya harus mencari secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidup, pengalaman dalam melakukan usaha, dan hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan pemberian produk bank tersebut.

2) *Porpose*

Porpose bertujuan agar bank mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit yang sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁴ Hermansyah, *Loc.Cit.*

3) *Prospect*

Prospect bertujuan agar bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh si pemohon kredit atau produk bank lainnya.

4) *Payment*

Payment ini berintikan bahwa dalam menyalurkan kredit, bank harus mengetahui secara jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai formula 5C dalam memaksimalkan kehati-hatian dalam perbankan, terbagi atas:

1) *Character*

Ini merupakan kewajiban perbankan untuk mengetahui watak, moral, dan sifat pribadi yang baik dari calon nasabah, penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi dan menjalankan usahanya.

2) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan serta dapat melaksanakan kewajibannya terhadap bank dengan baik.

3) *Capital*

Capital merupakan modal yang dimiliki oleh calon nasabah, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dipunyai oleh si calon nasabah.

4) *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah tersebut di kemudian harinya.

5) *Condition of Economy*

Hal ini diartikan bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin akan terjadi oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *prudential banking* atau kehati-hatian dalam perbankan merupakan bagian dari bentuk suatu pengawasan bank yang ditunjang oleh beberapa formula sebagai pedoman dalam perbankan.

Perangkat pengawasan bank yang diperlukan sebagai prakondisi untuk mencapai efektivitas dalam melaksanakan kegiatannya adalah:¹⁵

1. Undang-Undang atau produk legislatif yang menetapkan kerangka tatanan yang jelas, harus dapat dicapai dan konsisten dengan tujuan, tanggung jawab dan fungsi pengawasan bank, sehingga harus mengandung unsur *independensi operasional*, bebas dari kepentingan politik, dan adanya akuntabilitas bagi pengawasan bank dalam mencapai tujuannya.
2. Sumber daya yang memadai termasuk sumber daya manusia, sumber dana untuk pembiayaannya, dan teknologi guna mencapai tujuannya. Hal tersebut tidak boleh mengakibatkan terganggunya otonomi, integritas, dan independensi pengawas bank.
3. Kerangka tatanan hukum perbankan yang menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank, mengizinkan fleksibilitas yang cukup bagi pengawas bank untuk menetapkan ketentuan berdasarkan asas kehati-hatian, menetapkan *judgment kualitatif*, dan jika perlu menerapkannya agar sesuai dengan tujuan pengawasan bank, memberikan kekuasaan/kewenangan dalam

¹⁵ Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 77-78.

mengumpulkan informasi dan melakukan verifikasi yang independen serta memberikan wewenang kepada pengawas bank menetapkan berbagai *penalty/sanksi*, bila ketentuan *prudential bank* di langgar, termasuk mengganti pengurus bank, mengenakan sanksi, dan mencabut izin.

4. Proteksi dari segi hukum atas tanggung jawab perorangan atau institusi dari tindakannya yang di ambil berdasar niat baik (*in good faith*), dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan bank.
5. Suatu sistem kerja sama antar lembaga dalam rangka tukar informasi yang relevan, baik dalam maupun luar negeri, yang bertanggung jawab atas kesamaan dan kesehatan sistem finansial. Kerja sama tersebut harus di dukung oleh perjanjian agar kerahasiaan informasi terjaga dan hanya digunakan dalam rangka efektifitas pengawasan bank. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan bank dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang telah disebutkan di atas.

b. Teori Kehendak (*Wils Theory*)

Dalam teori kehendak ini, faktor yang menentukan adanya suatu perjanjian adalah kehendak. Oleh sebab itu, terdapat suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kehendak dengan pernyataan karena suatu kehendak harus dinyatakan. Namun, apabila tidak terjadinya suatu kesesuaian antara kehendak dengan pernyataan maka tidak dapat

terbentuknya suatu perjanjian.¹⁶ Apabila dikaitkan dengan Prinsip Mengenal Nasabah pada perbankan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdapatnya suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwens Theory*)

Dalam teori kepercayaan ini berusaha untuk membentuk suatu perjanjian yang bergantung kepada kepercayaan atau pengharapan yang muncul oleh para pihak dan merupakan akibat dari pernyataan yang diungkapkan.¹⁷ Apabila teori ini dikaitkan dengan sektor perbankan, maka dapat dilihat perbankan mempunyai keyakinan berupa kepercayaan, bahwa setiap kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan bank percaya yang bersangkutan mampu untuk melunasi semua kewajibannya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghilangkan suatu keraguan dan kerancuan di dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud antara lain:

¹⁶ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 76.

¹⁷ *Ibid.*

a. Penerapan

Penerapan jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti suatu perbuatan. Sedangkan awalan “pe” dan “an” pada kata penerapan tersebut berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁸

b. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk mengenali dan mencari kebenaran segala sesuatu dari identitas nasabah atau pengguna jasa baik dalam lembaga keuangan bank maupun non bank. Sejalan dengan itu, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini sangat penting dalam rangka penerapan *prudential banking* yang bertujuan untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.¹⁹

c. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.²⁰

d. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹

¹⁸ Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Surabaya, Kashiko, hlm. 207.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 73.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian menerangkan dan memaparkan objek yang diteliti secara objektif tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan dan melihat penerapan peraturan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²²

Penelitian ini mengkaji dan mengungkapkan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dengan pendekatan konseptual yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

²¹ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 133.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data Sekunder, merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- c. Peraturan Perundang-undangan:
 - a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- d. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan:
 - a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah.
 - b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and propertest*) Bank Perkreditan Rakyat.

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 yang kemudian di rubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2007 yang kemudian di rubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- h) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU, Surat Edaran yang ditujukan kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti:

- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, tulisan-tulisan lepas, artikel-artikel bebas mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) maupun yang memuat pembahasan dan pemikiran ahli tentang hukum perbankan yang dapat dijadikan referensi untuk mendukung penulisan.
- b. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.²³

b. Data Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Adapun data primer tersebut peneliti peroleh dari instansi/lembaga yang merupakan lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, setiap

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 116.

bahan hukum itu harus di periksa ulang *validitas* dan *reliabilitasnya* atau mutu kehandalan, karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada pejabat yang berwenang di Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Wawancara dilakukan dengan cara semi struktur artinya dengan membuat daftar pertanyaan, yang kemudian dapat dikembangkan pada saat wawancara.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
2. Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
3. Bagian Dana Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
4. Bagian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
5. *Front Liner, Customer Service* Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
6. *Funding Officer* Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis.²⁴ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang akan di analisis.²⁵

b. Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan di teliti. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara kualitatif,²⁶ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian di tarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

²⁴ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 72.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 168-169.

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm. 77.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini di tulis secara sistematis dan terperinci dalam empat bab utama dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab dimana bab-bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijabarkan mengenai pengaturan dan pengertian Bank, Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) serta pengaturannya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan hambatan yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini Penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Perkembangan dan Pengertian Bank

Pada awalnya, munculnya perbankan sudah dapat diketahui sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi sebelum tahun masehi. Hal tersebut ditandai dengan dikenalnya tukar-menukar uang dikalangan masyarakat pada zaman tersebut. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan yang awalnya hanya berupa tukar-menukar uang saja tetapi sudah menerima titipan, tabungan, serta memberikan pinjaman dengan menetapkan bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.²⁷

Pertumbuhan dan perkembangan di Babylonia sekitar 2000 SM yakni munculnya lembaga yang mengarah terdapatnya unsur-unsur minimal keberadaan suatu bank berupa pinjam meminjam logam berharga seperti emas dan perak dengan membebankan bunga pinjaman yang dikenal dengan *temples of babylon*. Sedangkan di Yunani Tahun 500 SM muncul suatu lembaga yang dikenal dengan *greek temple* yang lebih bersifat menerima simpanan atau titipan dari masyarakat dengan memberi biaya simpanan atau titipan tersebut. Simpanan atau titipan tersebut oleh lembaga ini dapat dipinjamkan kembali kepada orang atau pihak lain dengan mengutip beban biaya berupa bunga. Dalam perkembangannya, bermunculan bank-bank

²⁷ Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

lainnya dengan kegiatan tukar-menukar uang serta kegiatan-kegiatan perbankan lainnya.

Berdasarkan sejarah Yunani, lembaga perbankan pertama sekali muncul sekitar Tahun 560 SM, walaupun tugas dan lapangan usahanya masih sangat terbatas. Selanjutnya setelah zaman Yunani, di Romawi muncul usaha perbankan yang lebih luas tugas dan usahanya antara lain berupa menerima deposito, pemberian kredit, transfer dana, di samping tukar-menukar uang. Sekitar abad ke XII dan XIV Masehi, bermunculan lembaga-lembaga perbankan, seperti Bank Venesia (1171), Bank Of Genoa, dan Bank Of Barcelona (1320).²⁸

Dalam catatan perbankan yang sangat bersejarah di Inggris tepatnya awal Abad XVI M yang diperkirakan cikal bakal uang kertas, dimana pada masa itu di London dan juga Amsterdams, Antwerpen, dan Leuve di Belgia, tukang-tukang emas menerima uang logam berharga yang terbuat dari emas dan perak untuk di simpan oleh perusahaannya. Tanda bukti penyimpanan adalah suatu tanda deposito yang dinamakan *goldsmith note*, artinya si tukang emas mempunyai utang. Dalam perkembangannya, *goldsmith* tersebut di terima sebagai alat pembayaran yang akhirnya, walaupun jaminan emasnya tidak ada. Namun dikeluarkan juga oleh tukang-tukang emas tersebut, sehingga berubahlah fungsi tukang emas menjadi usaha perbankan.²⁹

Perkembangan perbankan secara umum di Indonesia, diawali pada zaman pemerintah Hindia Belanda, pada waktu itu di Indonesia telah

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

mempunyai sejumlah lembaga perbankan, bank pada waktu itu terbagi dalam dua kelompok yaitu bank yang ditangani langsung oleh pemerintah Belanda dan bank yang tidak dicampuri oleh pemerintah jajahan pada saat itu. Adapun bank yang langsung ditangani oleh pemerintah jajahan Belanda yaitu *De Javasche Bank NV* yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, *De Algemene Volkscredit Bank* berdiri pada tahun 1934, dan *De Postpaar Bank*, yang didirikan pada Tahun 1889 M.

Sedangkan bank yang tidak langsung dicampuri oleh pemerintah jajahan pada saat itu adalah bank-bank yang bermodalkan Inggris, Jepang, Cina, dan Belanda, serta anak Pribumi Indonesia, bank tersebut diantaranya:³⁰

- a) *The Chartered Bank Of India* (Bank milik Inggris).
- b) *The Yokohama Species Bank*, *The Mitsui Bank*, dan *The Bank Of Taiwan* (milik Jepang).
- c) *The Overseas Chines Banking Corporation, NV Batavia* yang berpusat di Medan, dan *NV Bankevereeniging, Oei Tionghoa Ham* di Semarang (milik China).
- d) *Nationale Handels Bank, De Escomto Bank* (milik Belanda).
- e) Bank Nasional Indonesia di Surabaya, Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukittinggi, NV Bank Boemi di Jakarta.

Pada saat ini, Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang berasal dari *De Javasche Bank* yang didirikan 10 Oktober 1827. Dalam perkembangan sejarah Indonesia sekitar Tahun 50-an, telah banyak

³⁰ *Ibid.*

diterbitkan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perbankan Indonesia.

Pada umumnya bank lebih di kenal sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. bank juga di kenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya serta sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima berbagai macam bentuk pembayaran lainnya. Di Indonesia, segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terdapat beberapa pengertian bank diantaranya:

1. Menurut G. M Verryn Stuart mendefenisikan bank adalah suatu badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, yaitu dengan memberikan kredit berupa uang yang dierimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan uang baru kertas atau logam.³¹
2. Menurut B. N. Ajuha, bank menjalankan kegiatannya dengan menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih.

³¹ Malayu S. P Hasibuan. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. hlm. 2.

3. Produktif demi keuntungan masyarakat, bank juga diartikan sebagai saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan tingkat bunga yang menarik.³²
4. Berdasarkan kamus istilah hukum *Fockema Andrea*, mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Secara umum bank merupakan orang atau lembaga yang dalam melakukan pekerjaannya secara teratur menyediakan uang dari atau untuk pihak ketiga.³³
5. Menurut Abdurrahman, pengertian bank yang dituangkan dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perdagangan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, seperti halnya memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap uang, serta sebagai penyimpan benda-benda yang berharga, dan juga dalam pembiayaan.
6. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bank mempunyai arti sebagai kantor uang.³⁴
7. Berdasarkan sejarahnya, kata bank berasal dari kata "*banca*" yang mempunyai arti suatu tempat duduk yang memanjang, dimana banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tempat duduk. Pada abad pertengahan, pihak bank banyak memberikan pinjaman-

³² *Ibid.*

³³ *Op.Cit.*

³⁴ Wijowasito dan Titowasito, 1980, *Kamus Lengkap*, Bandung, hlm. 39.

pinjaman dan dalam melakukan usahanya tersebut duduk di bangku-bangku di halaman pasar.³⁵

2. Jenis-Jenis Bank

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank mempunyai peranan yang sangat penting serta mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan aktifitasnya, bank dapat dibedakan beberapa jenis dalam melakukan aktifitasnya antara lain jenis bank berdasarkan fungsinya, kepemilikan, dalam penciptaan uang giral. Bank juga dapat dibedakan berdasarkan status atau kedudukan serta cara menentukan harga dalam operasionalnya.³⁶ Dari segi fungsi dan tujuan usahanya, bank terdiri dari:

1. Bank Sentral

Bank Sentral ini merupakan bank yang dapat melakukan tindakan sebagai bankersnya bank pimpinan, dan juga sebagai pengawas sistem kebijakan moneter.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh negara, swasta, maupun koperasi, yang di dalam pengumpulan dananya lebih diutamakan dalam bentuk menerima simpanan giro, deposito.

³⁵ Munir Fuady, 2005, *Hukum Perbankan Modern*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

³⁶ Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung, CV. Utomo, hlm. 40-41.

3. Bank Tabungan

Merupakan bank yang kepemilikannya oleh negara, swasta, maupun koperasi yang dalam mengumpulkan dananya lebih kepada penerimaan dalam bentuk tabungan dan melaksanakan usahanya dengan memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

4. Bank Pembangunan

Bank Pembangunan adalah bank milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam melaksanakan pengumpulan dananya dalam bentuk penerimaan simpanan dalam bentuk deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, jangka panjang dan menyalurkannya kembali dalam bidang pembangunan saja.

Di tinjau dari segi kepemilikannya bank dapat di bagi menjadi beberapa jenis yaitu:³⁷

1. Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki dan didirikan oleh pemerintah sepenuhnya atau negara. Contohnya: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

2. Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ini terdapat pada daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing propinsi. Adapun modal Bank Pembangunan Daerah sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah itu

³⁷ Kasmir. *Op.Cit.* hlm. 34.

sendiri. Seperti BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat, dan BPD lainnya.

3. Bank Milik Swasta

Bank Milik Swasta ini terdiri dari Bank Milik Swasta Nasional atau Dalam Negeri dan Bank Milik Swasta Luar Negeri atau Asing. Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh Swasta Nasional dan begitu juga dengan keuntungan yang di dapat dari hasil usahanya. Sedangkan Bank Milik Swasta Asing merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Swasta Asing dan begitu pula dengan keuntungannya. Contoh Bank Milik Swasta Nasional yaitu: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

4. Bank Milik Koperasi

Bank ini merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang telah memiliki badan hukum koperasi.

5. Bank Milik Campuran

Bank jenis ini merupakan bank yang kepemilikan sahamnya campuran antara pihak swasta asing dengan pihak swasta nasional. Namun, dalam hal jumlah kepemilikan sahamnya lebih di dominasi oleh Warga Negara Indonesia. Contohnya: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank

Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacific Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, dan Bank PDFCI.

Dari segi kemampuannya dalam hal melayani masyarakat, bank secara umum terbagi atas 2 macam, pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Adapun kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dalam hal jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya sehingga dalam memperoleh status tersebut diperlukan penilaian kriteria tertentu.

Jenis bank berdasarkan statusnya terdiri atas:

1. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Syarat untuk menjadi Bank Devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa, jadi Bank Non Devisa merupakan kebalikan daripada Bank Devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Bank dapat juga di bagi berdasarkan cara dalam menentukan harganya yaitu Bank berdasar Prinsip Konvensional dan Bank berdasar Prinsip Syariah.³⁸

1. Bank Berdasar Prinsip Konvensional

Bank berdasar Prinsip Konvensional merupakan jenis bank yang banyak berkembang dan beroperasi di Indonesia. Bank berdasar Prinsip Konvensional ini tidak terlepas dari pengaruh dan sejarah bangsa Indonesia, dimana bank pada awalnya di bawa oleh kolonial Belanda ke Indonesia. Bank berdasar Prinsip Konvensional mempunyai metode tertentu yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, deposito, maupun untuk harga produk pinjaman berupa kredit.

Hal ini juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga tersebut dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*. Selain itu, untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem ini disebut dengan istilah *fee based*.

2. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasar Prinsip Syariah ini masih baru berkembang di Indonesia. Namun, di negara lain khususnya Timur Tengah sudah lama dikenal

³⁸ *Ibid.* hlm. 40.

seperti Arab Saudi, Mesir, dan Sudan. Di Timur Tengah, sistem syariah sudah sepenuhnya dilaksanakan yang merupakan landasan dalam operasional keuangannya. Di Indonesia, pemerintah memberikan suatu kebebasan dalam menentukan prinsip baik secara konvensional maupun berdasarkan syariah untuk mengelola lembaga keuangannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perbankan.

Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang menjalankan kegiatannya dengan Prinsip Konvensional. Pada bank yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam penentuan harga produk pada Bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)³⁹
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)⁴⁰
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)⁴¹

³⁹ *Mudharabah* adalah suatu kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁴⁰ *Musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana pendapatan atau keuntungan di bagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. *Kamus Perbankan Syariah*.

⁴¹ *Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah yaitu menentukan biaya sesuai syariah islam. Sumber hukum yang digunakan dalam melaksanakan penentuan harga dalam Prinsip Syariah yaitu ALQUR'AN dan Hadist Rasul.

3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

3.1 Asas Perbankan

Asas adalah suatu prinsip dasar. Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan suatu sarana yang dapat membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan hukum bukanlah sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Hal ini disebabkan, asas-asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.⁴²

Asas yang terdapat dalam perbankan merupakan prinsip dasar yang di pakai oleh bank dalam rangka melaksanakan tugasnya. Adapun asas-asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan prinsip dalam kegiatan perbankan antara lain:

⁴² Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 23.

1. Asas Demokrasi Ekonomi⁴³

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi merupakan demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia merupakan demokrasi pancasila yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Dalam sistem ekonomi Indonesia koperasi merupakan soko guru perekonomian.
- b. Perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang terpenting adalah moral.
- c. Perekonomian pancasila mempunyai hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial.
- d. Perkonomian pancasila mempunyai kaitan dengan persatuan bangsa, yang berarti nasionalisme menjiwai dalam setiap kebijakan ekonomi.

Sedangkan sistem perekonomian kapitalis, lebih bersifat kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara.

⁴³ Hermansyah., *Op.Cit*, hlm. 18.

- e. Sistem perekonomian pancasila menegaskan dengan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan ekonomi.

2. Asas Kehati-hatian (*Prudention Principle*)

Prinsip kehati-hatian yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi dapat dilihat bahwa bank dan semua para pihak yang terlibat dalam semua kegiatan perbankan tersebut, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Moch. Isnaini menyatakan bahwa, prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelola berasal dari masyarakat. Pihak bank yang telah berhasil menarik dana masyarakat, wajib mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat. Oleh karena itu, masalah kesehatan bank menjadi tolak ukur untuk menetapkan upaya pengelolaan bank sudah dijalankan dengan benar.⁴⁴

Sejalan dengan pernyataan di atas, asas kehati-hatian merupakan asas yang mengharuskan perbankan untuk teliti dan hati-hati dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan.

⁴⁴ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman. *Op.Cit.* hlm.28.

3. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan merupakan asas dalam dunia perbankan yang lebih bersifat dan dilandasi dengan adanya suatu hubungan kepercayaan antara nasabah dengan pihak bank. Bentuk kepercayaan ini dapat dilihat melalui adanya keinginan dari masyarakat atau nasabah yang mempercayakan dana yang dimilikinya untuk di simpan pada bank dengan tujuan terjaminnya keamanan terhadap dana tersebut.

4. Asas Kerahasiaan (*Convidention Principle*)

Asas kerahasiaan lebih bersifat mewajibkan suatu bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dan berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah. Hal ini sesuai dengan kepatutan yang terdapat dalam dunia perbankan yang wajib dirahasiakan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam dunia perbankan.

3.2 Fungsi dan Tujuan Perbankan⁴⁵

Pada dasarnya perbankan di Indonesia memiliki suatu fungsi dan misi yang bersifat khusus yaitu mendapatkan keuntungan. Namun, di sisi lainnya perbankan juga memiliki suatu fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan juga hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁶

⁴⁵ Hermansyah. *Op.Cit.* hlm. 20.

⁴⁶ Muhamad Djumhana. *Op.Cit.* hlm. 110.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dari ketentuan tersebut terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang berkekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Sedangkan tujuan perbankan di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada sisi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

B. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka secara tidak langsung merupakan bank yang termasuk dalam pengawasan Bank Indonesia. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a) Kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan izin (*right to license*) Bank Perkreditan Rakyat.

- b) Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur (*right to regulate*) Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi (*right to control*) pada Bank Perkreditan Rakyat.
- d) Kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (*right to impose sanction*).

Semua pengaturan dan bentuk pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat, yang juga ikut berperan penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan sesuai dengan bentuk karakteristik operasionalnya. Akan tetapi, tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan dengan jelas bahwa, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank (badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁷

Dari pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertipikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan pelaksanaan tugasnya Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat berdasar Prinsip Syariah. Bank Perkreditan Rakyat yang berdasar Prinsip Konvensional mengambil keuntungan dari sistem bunga. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat yang berdasar Prinsip Syariah mengambil keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁴⁷ Pasal 13 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdiri atas:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *murabahah*, deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* dan/atau bentuk lainnya yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk transaksi jual beli berdasarkan prinsip syariah islam.
- 3) Transaksi sewa menyewa sesuai prinsip syariah islam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah islam.

1. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat diawali sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yaitu sekitar Abad ke-19. Pada saat itu pendirian Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk membantu serta mengurangi beban masyarakat yang terdiri dari golongan petani, pegawai, buruh, pengrajin, dan pengusaha kecil untuk melepaskan diri dari jerat utang atau rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang sangat tinggi.⁴⁸

Tabel 1
Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat

Abad ke-19	:	Dibentuknya lumbung desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa.
Pasca Kemerdekaan Indonesia	:	Didirikannya Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa.

⁴⁸ Bank Indonesia. 2006. *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. hlm. 1.

Awal 1970-an	:	Didirikannya lembaga dana kredit pedesaan oleh pemerintah.
1988	:	Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha "Bank Perkreditan Rakyat" atau BPR.
1992	:	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis Bank selain Bank Umum.
		Peraturan Pemerintah Nomor 71/1992, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997.

Sumber: [http://www. Hukum Online](http://www.HukumOnline) Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2012.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan secara khusus mengenai sejarah awal Bank Perkreditan Rakyat yang diawali sejak Abad ke-19, semasa penjajahan Belanda. Pasca kemerdekaan Negara Indonesia dari

penjajahan, Bank Perkreditan didirikan walaupun sebagai lembaga keuangan dengan skala kecil dan berada pada pedesaan, seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD).

Tahun 1970-an adalah masa-masa mulai bertumbuhnya puluhan Bank Perkreditan Rakyat.⁴⁹ Pada era ini Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/26-V/PPTR bertanggal 19 Agustus Tahun 1971 yang menyatakan bahwa, adanya kewenangan dari Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk mendirikan Lembaga atau Badan Perkreditan Bank. Pendirian bank ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sampai ke pedesaan berupa menyalurkan kredit.

Pada Tahun 1988 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu paket kebijakan yaitu pada bulan Oktober yang dikenal dengan PAKTO 1988. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 yang menjadi awal kebangkitan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut terdapat kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam kebijakan PAKTO 1988 dinyatakan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di kota-kota seperti halnya ibukota Negara, ibukota Propinsi, serta ibukota Kabupaten dapat ditingkatkan menjadi Bank Umum. Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang tidak dapat mengembangkan dirinya, harus berpindah tempat ke luar kota dalam jangka waktu 2 tahun.⁵⁰ Dilahirkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 telah

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 1.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 2.

memberikan suntikan yang berharga dalam perkembangan Bank Perkreditan Rakyat, serta terciptanya kepastian hukum Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri.

4 (empat) tahun setelah dikeluarkannya PAKTO 1988, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lahirnya Undang-Undang tentang Perbankan tersebut memberikan penambahan kejelasan dan kepastian hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Dalam Undang-Undang Perbankan dinyatakan dengan jelas bahwa, Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu bank selain Bank Umum, sehingga secara tidak langsung Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.

2. Operasional dan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan utama yang mengatur operasional kelembagaan suatu Perbankan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, meliputi pendirian Bank Perkreditan Rakyat, dan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat. Adapun operasional sektor perbankan sebenarnya telah diwakili dari pengertian perbankan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.

Selanjutnya, pada Pasal 2-nya dinyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan operasional untuk Bank Perkreditan Rakyat berupa menghimpun dana dari masyarakat seperti bank pada umumnya, terkecuali dalam hal memberikan jasa lalu lintas keuangan.

Sebelum melaksanakan kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan juga mendapatkan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sesuai dengan perintah dari Undang-Undang, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Adapun pengawasan tersebut berupa:

- a. Pembinaan terhadap Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Pengawasan langsung atau tidak langsung terhadap Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Penanganan atas permohonan izin pendirian Bank Perkreditan Rakyat dan izin yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat.⁵¹

Secara umum syarat dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat telah di atur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu:⁵²

- a) Warga Negara Indonesia;

⁵¹ Frianto Pandia, dkk. 2009. *Lembaga Keuangan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. hlm. 33.

⁵² Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- b) Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
- c) Pemerintah Daerah; dan
- d) Kerja sama antara para pihak tersebut di atas.

Berdasarkan prinsipnya Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Syariah. Adapun pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsipnya tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) izin usaha pendirian tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, wajib memenuhi persyaratan mengenai:⁵³

- a) Susunan organisasi dan kepengurusannya.
- b) Permodalan.
- c) Kepemilikan.
- d) Keahlian di bidang perbankan.
- e) Kelayakan rencana kerja.

Pihak pemohon izin usaha untuk Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan yang telah di atur sebelumnya dalam peraturan

⁵³ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.* hlm. 226.

Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat dan harus melampirkan:⁵⁴

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar badan hukum yang memuat diantaranya:
 - a) Nama dan tempat kedudukan;
 - b) Kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
 - c) Permodalan;
 - d) Kepemilikan;
 - e) Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris.
- b. Data kepemilikan yang harus dipenuhi berupa:
 - a) Daftar calon pemegang berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
 - b) Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi.
- c. Daftar calon anggota direksi dan dewan komisaris.
- d. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia.
- e. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 227.

- f. Rencana sistem dan prosedur kerja.
- g. Bukti setoran modal paling sedikit 30 persen dari modal yang di setor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, dimana salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- h. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk Perseroan Terbatas atau dari calon anggota bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi bahwa setoran modal di setor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain atau tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Berdasarkan persyaratan di atas, dapat dilihat bahwa sangat pentingnya pemenuhan persyaratan dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Penentuan persyaratan pendirian Bank Perkreditan Rakyat diputuskan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal permohonan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tertentu dan harus melampirkan:⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 228.

- a) Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- b) Data kepemilikan yang berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, dan daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi.
- c) Daftar susunan dewan komisaris dan dewan direksi.
- d) Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia.
- e) Bukti pelunasan modal di setor dalam bentuk bilyet deposito.
- f) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi bahwa, setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau dari pihak lain dan tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.
- g) Bukti kesiapan operasional berupa, daftar aktifa tetap dan inventaris, bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor, foto gedung kantor dan tata letak ruangan, contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional bank, dan nomor pokok wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Bank Indonesia memiliki langkah-langkah berupa:

- a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen, baik untuk persetujuan prinsip maupun izin usaha.
- b. Analisis yang mencakup tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat dan tingkat kejenuhan jumlah Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Wawancara terhadap calon pemilik, anggota dewan komisaris, dan direksi.
- d. Memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip dan izin usaha maksimal enam puluh hari setelah dokumen di terima Bank Indonesia secara lengkap, apabila dalam jangka waktu tersebut persyaratan yang ditentukan belum terpenuhi maka Bank Indonesia akan membatalkannya.⁵⁶

2) Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Secara umum, pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan Prinsip Syariah tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Konvensional. Dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat kekhususan berupa terdapatnya Dewan Pengawas Syariah.

Dalam kegiatan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat berdasar Prinsip Syariah pengawasan internalnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah,

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 229.

yaitu dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah Islam dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah harus mutlak memiliki Dewan Syariah Islam yang berkedudukan di kantor pusat.⁵⁷

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu terdiri atas:

- a. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan diantaranya:
 - 1) Integritas, yaitu pihak-pihak memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga berkomitmen untuk mengembangkan operasional bank yang sehat serta tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Kompetensi, yaitu para pihak harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah dan pengetahuan di bidang perbankan secara umum.
 - 3) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar kredit atau pembiayaan macet, serta tidak pernah dinyatakan pailit serta menjadi direksi atau

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 230.

komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit.

b. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, antara lain:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank yang bersangkutan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.
- 3) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.
- 4) Memberikan opini dan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank yang bersangkutan secara keseluruhan dalam publikasi bank tersebut.
- 5) Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
- 6) Meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank yang bersangkutan serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan.

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh

persetujuan Bank Indonesia dan penetapan Dewan Syariah Nasional sebelum di angkat dan menduduki jabatannya.

- d. Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib disampaikan oleh direksi bank bersangkutan kepada Bank Indonesia dan wajib melampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Permohonan untuk memperoleh penetapan wajib disampaikan oleh direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan Bank Indonesia.
- f. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah diberikan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah dokumen permohonan di terima secara lengkap. Dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan, Bank Indonesia melakukan:
 - 1) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - 2) Wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
- g. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sepuluh hari setelah pengangkatan efektif.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 233.

Dapat disimpulkan bahwa, Dewan Pengawas Syariah mempunyai persyaratan tertentu dan juga bersifat urgent dalam internal Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

3. Kredit Sebagai Produk Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat

Sesuai dengan pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri, terlihat bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat tidak bergerak dalam memberikan jasa lalu lintas keuangan. Pada umumnya, bentuk produk Bank Perkreditan Rakyat hanya berupa tabungan, deposito dan kredit.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁵⁹ Sedangkan, deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁶⁰ Adapun produk bank yang paling menentukan yaitu kredit, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶¹

Dari pengertian kredit di atas terlihat bahwa, kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat di ukur dengan uang,

⁵⁹ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶⁰ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.⁶² Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit harus adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah. Peranan perjanjian dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat sangat menentukan kepastian hukum dan kelangsungan kredit itu sendiri.

Sebelum pemberian kredit sangat penting untuk meyakinkan bank bahwa nasabah dapat dipercaya. Oleh karenanya, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁶³

Pemberian kredit tanpa adanya analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank itu sendiri, karena adanya peluang nasabah untuk memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Dengan kurangnya analisis perbankan dalam pemberian kredit dapat menyebabkan terjadinya kredit macet yang nantinya merugikan bank itu sendiri. Dengan melihat hal tersebut, di pandang perlu upaya Bank Perkreditan Rakyat untuk memaksimalkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya.

⁶² Kasmir, *Op.Cit.* hlm. 97.

⁶³ *Ibid.*

Jenis-jenis kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis antara lain:⁶⁴

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau keperluan rehabilitasi.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- c. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- d. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk di konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk di pakai oleh seseorang atau badan usaha.
- e. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang ditujukan untuk perdagangan, yang biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan.
- f. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 Tahun atau paling lama 1 Tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja.
- g. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berkisar 1 Tahun sampai dengan 3 Tahun, biasanya untuk keperluan investasi.
- h. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, kredit ini memiliki waktu pengembalian di atas 3 Tahun ataupun 5 Tahun, biasanya kredit ini untuk keperluan investasi jangka panjang.
- i. Kredit Dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud.
- j. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- k. Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perbankan atau pertanian rakyat.
- l. Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek, digunakan untuk sektor peternakan.
- m. Kredit Industri, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai industri kecil, menengah, dan besar.

⁶⁴ *Ibid.*

- n. Kredit Pertambangan, yaitu kredit yang ditujukan untuk sektor pertambangan.
- o. Kredit Pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
- p. Kredit Perumahan, yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa banyaknya jenis kredit yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah, dengan banyaknya bentuk kredit yang diberikan maka ketelitian dalam pemberian kredit tersebut sangat wajib diperhatikan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

C. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah

1. Pengertian dan Tujuan Prinsip Mengenal Nasabah

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang telah memiliki kepercayaan tinggi dalam kehidupan masyarakat dan mempunyai pengaruh dalam perekonomian suatu negara. Dengan adanya pengaruh tersebut sangat di pandang perlu upaya ekstra dari pihak perbankan untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai peran penting untuk mengurangi risiko pada perbankan, Deputi Unit Khusus Investigasi Perbankan Indonesia, Sundari S. Arie M menyatakan bahwa, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.⁶⁵

⁶⁵ PPH News Letter No.51, 2002, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta, hlm.

Prinsip Mengenal Nasabah ini didasari dengan suatu pertimbangan untuk mengurangi tindak kejahatan pada bank dan menghindari semua risiko yang dapat menyebabkan kerugian pada sektor perbankan. Prinsip Mengenal Nasabah ini harus dilakukan karena didalamnya terdapat upaya untuk mengetahui identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontiniu, dan kemudian pelaporan terhadap pihak yang berwenang.⁶⁶ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah dan semua transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank yang meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.

Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank mempunyai kewajiban untuk menetapkan beberapa kebijakan yaitu:⁶⁷

- a. Kebijakan penerimaan nasabah.
- b. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
- d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 73.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 75.

Pada sektor perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai tujuan antara lain:

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan dalam sektor perbankan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Untuk mencegah dan mengurangi dampak risiko-risiko yang akan timbul dalam internal maupun eksternal perbankan.
- 3) Dengan dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah ini bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah, dengan begitu bank dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang mencurigakan.⁶⁸

2. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam sektor perbankan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bank. Untuk dilaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah ini, maka pemerintah memberikan penguatan dan kepastian hukum berupa menerbitkan peraturan tentang kewajiban sektor perbankan dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut.

Adapun peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah antara lain:⁶⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

⁶⁸ Berdasarkan Buku Pedoman Perbankan tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah yang di kutip oleh Rivaldo, hlm.2.

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 73.

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP Tanggal 13 Desember 2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 8) Surat Edaran Nomor 5/32/DPNP Tanggal 4 Desember 2003 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/29/DPNP.
- 9) Surat Edaran Nomor 6/37/DPNP Tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Pengaruh Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu hubungan secara kontraktual. Hubungan secara kontraktual merupakan hubungan hukum yang paling lazim dilakukan antara bank dengan nasabah. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang di buat antara bank sebagai kreditur dengan pihak debitur.⁷⁰

Walaupun terdapat prinsip dalam hubungan antara nasabah dengan pihak bank yang nantinya disebut dengan hubungan debitur dengan kreditur. Dalam hubungan tersebut terdapat 3 hal yang sangat *principle* dari pemberlakuan hubungan kontraktual pada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu: Pertama, adanya hubungan debitur (bank) dengan kreditur (nasabah). Kedua, sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur dengan kreditur. Ketiga, sebagai hubungan *implied contract* yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

⁷⁰ Munir Fuady. *Op.Cit.* hlm. 100.

Sejalan dengan itu J. Milnes Holden dalam bukunya *The Law and Practice of Banking* memberikan pendapat bahwa, hubungan kontraktual yang ada antara bank dan nasabah tersebut adalah hubungan yang kompleks yang pada mulanya terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan.⁷¹ Setelah adanya hubungan kontraktual antara nasabah dengan pihak bank maka akan timbul suatu perikatan yaitu perikatan yang ditimbulkan atas dasar perjanjian.⁷²

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa, dengan adanya suatu hubungan hukum secara kontraktual antara bank dengan nasabah maka secara tidak langsung memberikan dampak positif dan memberikan suatu kepastian hukum terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa hubungan kontraktual tersebut memberikan kemudahan terhadap terlaksana Prinsip Mengenal Nasabah pada sektor perbankan.

Dengan adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh bank dengan nasabah secara tidak langsung telah meminimalisir terjadinya kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul dalam sektor perbankan itu sendiri seperti:

- a. *Operational Risk*, yaitu risiko bank tidak dapat melakukan operasionalnya secara normal, yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gangguan, kegagalan sistem informasi manajemen dan komunikasi, ketidakpastian ketentuan, kelemahan struktur pengendalian, dan adanya problem eksternal.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Djoni S. Ghazali, dkk. *Op.Cit.* hlm 243.

- b. *Legal Risk*, yaitu adanya risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti halnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perilaku seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- c. *Concentration Risk*, yaitu risiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah.
- d. *Reputational Risk*, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.⁷³

⁷³ *Ibid.* hlm.254.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang

1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang

Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di daerah Sumatera Barat.

Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas ini terdiri atas:⁷⁴

1. Kantor Pusat yang berdomisili di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Sicincin. Kantor Pusat ini mulai beroperasi pada tanggal 3 November 1997.
2. Kantor Cabang yang terdapat di Kota Padang, yaitu di Jl. Andalas Nomor 74 Padang, yang mulai beroperasi pada tanggal 21 Mei 2007. Serta Kantor Cabang yang terletak di Pariaman, yaitu Jl. Bgd. Aziz Chan Nomor 128 Pariaman, yang beroperasi pada tanggal 8 September 2008.
3. Kantor Kas yang berlokasi di daerah Balai Baru yaitu Jl. Raya Sicincin-Pariaman, yang dioperasikan pada tanggal 15 Januari 2001. Kantor Kas Duku di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Pasar Lb. Alung, yang beroperasi tanggal 9 September 2002. Serta yang terakhir Kantor Kas Lubuk Alung yaitu di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Pasar Lubuk Alung yang beroperasi tanggal 14 Agustus 2006.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa, secara umum profil dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas terdiri dari satu kantor pusat, dua kantor cabang dan tiga kantor kas. Bank Perkreditan

⁷⁴ Berdasarkan Profile Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, Posisi 3 Januari 2012, hlm. 3.

Rakyat Cincin Permata Andalas dalam melaksanakan kegiatannya berada pada wilayah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang menyatakan bahwa, sebelum melaksanakan kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang telah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana dianjurkan oleh Undang-Undang.⁷⁵ Adapun persyaratan Legalitas yang telah dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang adalah adanya Akta Pendirian Nomor 8 dan Perubahan Nomor 15 tanggal 15 Maret 1997 Notaris Zamris. Serta Izin Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C2-4-562 HT01. 01 Tahun 1997 tanggal 3 Juni 1997.

Persyaratan legalitas lainnya yaitu Izin Operasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Keputusan 537 /KM. 17/1997 tanggal 10 Oktober 1997 dan Akta Nomor 47 tanggal 10 Juli 2007 Notaris Lynda Djannas Primma di Padang tentang perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat Sicincin menjadi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas dan Akta Nomor 36 tanggal 10 Juli 2008 Notaris Syamsuhardi di Padang tentang perubahan pengurus periode 2010-2014, Akta Nomor 93 tanggal 22 Oktober 2011, Notaris Lynda Djannas Primma di Padang tentang Perubahan Pengawasan, Akta Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2011, Notaris Lynda Djannas Primma di Padang tentang Perubahan Modal Disetor, SK Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU 58097. AH 01.02 Tahun

⁷⁵ Wawancara dengan Jalius Raden, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 12 September 2012.

2011 tanggal 2-11-2011, NPWP: 01.758.758.5.201.000 tanggal 21 April 1997.

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang memakai moto “**Akses Tanpa Batas**”. Adapun Visi dari Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu menjalankan usaha-usaha perbankan khususnya di sektor usaha menengah kecil mikro yang produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Sedangkan Misi dari Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada pengusaha kecil mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan.⁷⁶

Adapun produk-produk bank yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, yaitu:

a. Simpanan

- 1) Tabungan Kami-TAMI
- 2) Tabungan Bersama-TAMA
- 3) Tabungan Puro Nagari-TAPURI
- 4) Deposito Berjangka

b. Kredit

- 1) KUMI-MK (Kredit Usaha Menengah Investasi-Modal Kerja),
yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat

⁷⁶ Berdasarkan Profile Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, Posisi 3 Januari 2012, hlm 5.

Cincin Permata Andalas Padang berkisar 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah.

- 2) KUKI-INV (Kredit Usaha Kecil Investasi), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang berkisar 1 juta sampai dengan 10 juta rupiah.
- 3) KUKI-MK (Kredit Usaha Kecil Investasi-Modal Kerja), yaitu kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang berkisar 6 juta sampai dengan 10 juta rupiah.
- 4) KCC (Kredit Cicilan).
- 5) KMK-Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan berkisar 10 juta sampai 400 juta rupiah.
- 6) KI-Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan berkisar 10 juta sampai dengan 400 juta rupiah.

c. Jasa Lainnya

- 1) Penerimaan PBB terhitung tanggal 2 Februari 2001.
- 2) Penerimaan pembayaran Rekening Telepon Online Sumbar terhitung tanggal 11 Mei 2001.
- 3) Penerimaan pembayaran PDAM terhitung bulan Juni 2002.
- 4) Penerimaan pembayaran Rekening Listrik Online terhitung bulan Agustus 2005.
- 5) Transfer/Pengiriman uang (*Western Union*) terhitung bulan April 2006.

Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang ini memiliki 40 orang karyawan, yang terbagi atas 1 orang berpendidikan S2, dan 26 orang berpendidikan S1, 4 orang berpendidikan DIII, serta 9 orang berpendidikan SMU/SLTP. Berdasarkan jumlah karyawan dan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat bahwa Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, yang hanya menawarkan produk bank yang sederhana, tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlalu rendah.

Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang dinyatakan sehat. Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang ini dihitung dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu dengan nilai 98.50.⁷⁷

Pada tahun 2011 terdapat kejadian yang sangat penting dalam perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, dimana Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas mendapat penghargaan dari Info Bank Award 2011 dengan predikat sangat bagus dalam melaksanakan kinerja keuangan pada tahun 2010. Dalam melaksanakan kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank diantaranya:

1. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Bank Mandiri.

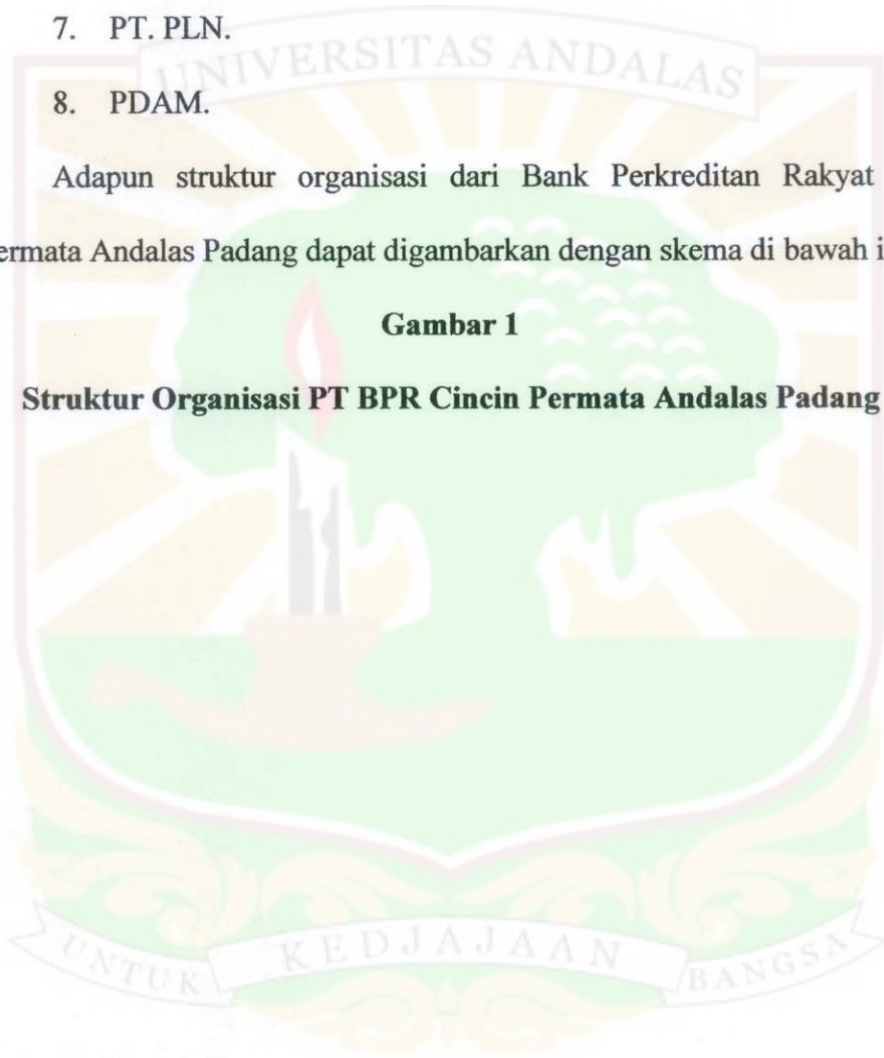
⁷⁷ Berdasarkan Profile Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, Posisi 3 Januari 2012, hlm 8.

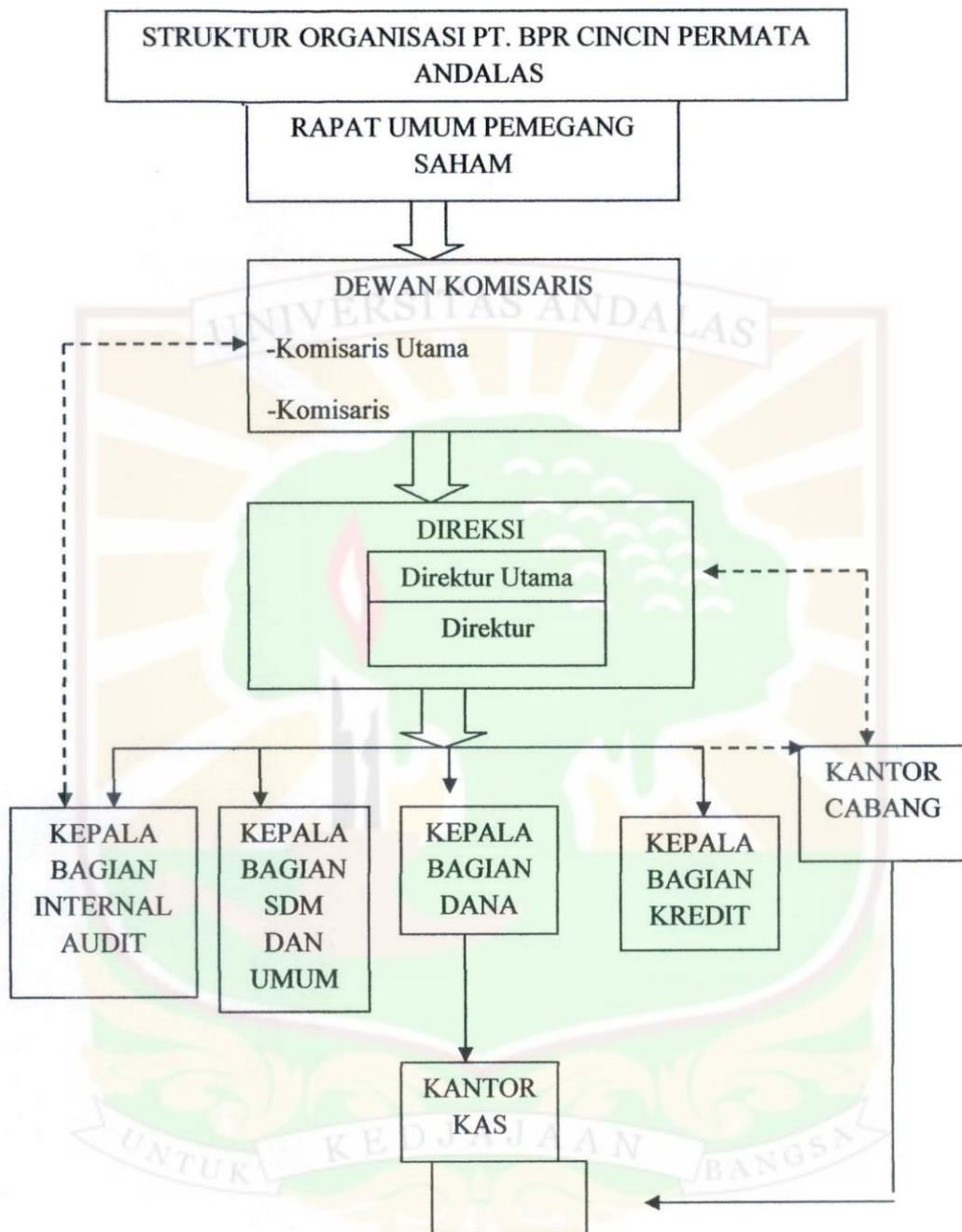
3. PT. PNM.
4. PT. Mitra Dana Jimbaran.
5. BPR Perbarindo.
6. PT. Telkom.
7. PT. PLN.
8. PDAM.

Adapun struktur organisasi dari Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dapat digambarkan dengan skema di bawah ini:

Gambar 1

Struktur Organisasi PT BPR Cincin Permata Andalas Padang





Penjelasan mengenai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab unit-unit atau bagian yang terdapat dalam bagan susunan organisasi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas di atas dapat dilihat pada lampiran.

2. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang

Sebelum dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, terlebih dahulu sangat perlu dijelaskan mengenai peranan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, yaitu:

1. Tugas Direksi

Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Direksi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan-kebijakan terhadap Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Memastikan dan menentukan bahwa kebijakan yang telah di buat mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah dilaksanakan dan diterapkan sesuai yang diharapkan oleh bagian-bagian atau unit-unit kerja yang terdapat dalam internal Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
- c. Upaya pemantauan dalam pelaksanaan penerimaan nasabah berdasarkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Memantau identifikasi nasabah yang terbaru serta termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang di anggap mempunyai risiko tinggi.

- e. Memantau dan memperbaharui profil nasabah serta profil transaksinya.
- f. Melakukan analisis atas Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
- g. Menetapkan keputusan akhir atas transaksi yang mencurigakan.
- h. Memantau penyusunan Transaksi Keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.
- i. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- j. Memastikan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan nasabah telah mempertimbangkan negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi, bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang, serta nasabah yang di anggap mempunyai risiko tinggi dalam kegiatan pencucian uang.
- k. Memastikan adanya sistem pencatatan dalam rangka memudahkan identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan mencurigakan.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Direksi memiliki peranan penting sebagai pemegang komando terhadap terlaksana atau tidaknya semua kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Cincin

⁷⁸ Wawancara dengan Jalius Raden, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 12 September 2012.

Permata Andalas Padang. Hal ini sejalan dengan yang diamanahkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010.

2. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 pada Pasal 5 dinyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat terdiri atas:

- a. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Memberikan pengawasan terhadap Direksi Bank Perkreditan Rakyat dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut.

Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh calon nasabah dan/atau yang telah menjadi nasabah. Adapun proses tersebut harus dilakukan oleh petugas bank yang berwenang dengan benar dan tepat serta sesuai dengan Standar Operasional bank sehingga dapat terlaksananya Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan petugas antara lain:⁷⁹

- a. Proses mengenal nasabah, yaitu dengan cara melakukan verifikasi identitas calon nasabah. Hal ini dilakukan sebelum hubungan usaha dengan calon nasabah disetujui serta memastikan dasar dan bentuk hubungan usaha yang akan dilakukan antara bank dengan nasabah.

⁷⁹ Wawancara dengan M. Ichwan, Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 17 September 2012.

- b. Kebijakan penerimaan nasabah berdasarkan tingkat risiko yang di terima oleh bank. Semakin besar risiko yang di terima bank maka akan semakin ketat pula pemeriksaan yang dipersyaratkan.
- c. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah. Jadi pada saat nasabah akan membuka rekening pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, petugas nantinya akan meminta fotokopi kartu identitas calon nasabah dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain fotokopi tersebut petugas juga meminta calon nasabah untuk memperlihatkan kartu identitas asli berserta dokumen-dokumen pendukung untuk mengetahui apakah fotokopi sesuai dengan yang asli.
- d. Pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- e. Apabila di pandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas, dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah.
- f. Menolak calon nasabah yang tidak mematuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dan diragukan kebenarannya.

Sehubungan dengan teori *prudential banking*, yang lebih dikenal dengan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, maka tahapan dalam

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh petugas pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang tersebut di atas, telah memenuhi prinsip 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment*) dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Formula 4P dan 5C tersebut merupakan pedoman bagi petugas pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang untuk melakukan pengawasan kepada setiap nasabahnya. Hal ini diperjelas bahwa, *prudential banking* memiliki persinggungan yuridis yang didalamnya satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank dapat melakukan kegiatannya secara hati-hati yaitu dengan cara perbankan dalam melakukan kegiatannya tidak boleh membawa risiko yang substansial (*substantive risk*) dan bersifat spekulatif, serta bank tidak boleh melaksanakan bisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Moch. Isnaini menyatakan *prudent banking* atau kehati-hatian bank merupakan benang merah yang sangat perlu diperhatikan karena mengingat adanya dana yang dikelola berasal dari masyarakat, serta pihak yang telah berhasil menarik dana dari masyarakat wajib mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat, karena masalah kesehatan bank menjadi tolak ukur dalam menetapkan upaya pengelolaan dengan benar. Selanjutnya PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat ini penting untuk diterapkan, karena merupakan kewajiban dari Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi kontrol sebagai Bank Sentral.

Bagi nasabah yang melakukan transaksi dengan jumlah transaksi di atas 100 juta ada keharusan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang untuk melaporkan ke Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, walaupun nasabah tersebut tidak mempunyai rekening di Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Selain itu, nasabah juga diharuskan mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang didalamnya berisikan data-data nasabah, sumber pendanaan, tujuan pembukaan rekening, dan pernyataan calon nasabah tentang kesediaannya untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan pernyataan tentang kebenaran dari data-data yang diisikan dalam formulir.⁸⁰

Sedangkan untuk yang telah menjadi nasabah Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, petugas bank secara berkala memverifikasi ulang data-data dan dokumen-dokumen pendukung nasabah. Verifikasi ulang data dilakukan apabila data pendukung seperti kartu identitas telah hampir habis masa berlakunya atau terjadi perubahan data-data pada kartu identitas tersebut seperti alamat. Hal ini dilakukan agar semua data-data nasabah tersebut selalu sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di atas dapat dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang telah menerapkan prosedural dalam terlaksananya Prinsip Mengenal Nasabah, walaupun dalam penerapan prinsip

⁸⁰ Wawancara dengan M. Ichwan, Kepala Cabang Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 17 September 2012.

tersebut masih belum optimal dan terdapatnya hambatan. Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang juga memberlakukan kebijakan dengan mengetahui latar belakang dari calon nasabah atau nasabah itu sendiri, posisi nasabah atau domisilinya, negara asal dari nasabah, serta bentuk kegiatan usaha nasabah. Untuk selanjutnya berdasarkan tahapan di atas juga terdapat upaya Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang terhadap nasabah yang dapat dikategorikan sebagai berisiko tinggi.

Penjelasan dari tahapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini juga meliputi upaya peninjauan atau verifikasi ulang terhadap setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan juga dianjurkan untuk melakukan wawancara dengan nasabah itu sendiri secara berkala, meminta informasi nasabah yang ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan informasi dari nasabah tersebut, melakukan pemantauan identitas nasabah, pemantauan dokumen-dokumen tertentu yang dapat mendukung kebenaran setiap informasi yang telah diberikan nasabah.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dilakukan pada saat menerima nasabah baru atau pada saat bank akan memulai hubungan usaha dengan nasabah baru. Dimana pada saat calon nasabah datang, maka petugas yang berwenang akan langsung mempersilakan nasabah dan menanyakan maksud dan tujuan dari nasabah tersebut datang ke Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Apapun tujuan dari nasabah di atas baik ingin membuka rekening,

ataupun permohonan kredit dan jasa lainnya di Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, maka petugas bagian Pelayanan Nasabah akan meminta nasabah tadi untuk mengisi beberapa formulir yaitu formulir Aplikasi Pembukaan Rekening dan Formulir Prinsip Mengenal Nasabah (sebagaimana terlampir dalam Lampiran).⁸¹

Apabila dikaitkan dengan teori kehendak, maka tindakan petugas pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dalam hal menanyakan maksud dan tujuan dari nasabah yang bersangkutan, telah menimbulkan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kehendak dengan pernyataan, di sini diperlukan adanya kesesuaian antara kehendak dan pernyataan nasabah, dimana suatu kehendak itu harus dinyatakan, apabila tidak terjadinya suatu kesesuaian antara kehendak dengan pernyataan maka tidak dapat terbentuknya suatu perjanjian.

Hal tersebut dipertegas dengan pendapat J. Milnes Holden dalam bukunya yang berjudul *The Law and Practice of Banking* yang menyatakan bahwa, hubungan kontraktual yang ada antara bank dengan nasabah tersebut merupakan hubungan yang sangat kompleks. Diawali dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan. Setelah adanya hubungan kontraktual tersebut maka akan timbul suatu perikatan yang ditimbulkan dengan dasar perjanjian.

Adapun semua formulir yang harus di isi oleh nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang berisikan tentang

⁸¹ Wawancara dengan Novi Kartika, Bagian *Front Liner* Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 18 September 2012.

identitas nasabah sesuai dengan kartu identitas yang berlaku, sumber pendanaan, mata uang yang digunakan, penghasilan rata-rata perbulan, dan kegunaan dari pembukaan rekening. Setelah mengisi data-data yang diperlukan, maka petugas Pelayanan Nasabah akan meminta fotokopi kartu identitas beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukung seperti fotokopi slip gaji dan memperlihatkan kartu identitas yang asli dan dokumen pendukung yang asli untuk memastikan bahwa fotokopi tadi sesuai dengan yang aslinya.

Setelah nasabah mengisi formulir tersebut, maka nasabah harus menandatangani formulir yang telah di isi pada tempat yang telah disediakan sebagai tanda bahwa nasabah setuju dan sepakat untuk mengadakan hubungan hukum serta usaha dengan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan bersedia untuk mematuhi semua persyaratan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan atau disepakati oleh nasabah dengan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.⁸²

Apabila di pandang perlu maka, petugas Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang akan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi yang telah diberikan, bukti-bukti identitas yang sebenarnya, serta dokumen-dokumen pendukung calon nasabah. Dengan sudah terpenuhinya semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, maka data-data yang diberikan nasabah tersebut akan diinputkan ke dalam data nasabah, sehingga dengan dimasukkannya data nasabah tersebut

⁸² Wawancara dengan Novi Kartika, Bagian *Front Liner* Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 19 September 2012.

menandakan telah resmi menjadi nasabah dari Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.⁸³

Dalam hal ini, teori kepercayaan sangat diperlukan antara petugas pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan nasabah yang memohon. Di sini petugas pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang memiliki keyakinan dan percaya bahwa nasabah yang bersangkutan mampu untuk melunasi semua kewajibannya. Selain itu, petugas juga yakin dan percaya bahwa setiap kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah dan sesuai dengan peruntukannya.

Pernyataan di atas dipertegas dengan asas kepercayaan (*fiduciary principle*), dimana asas kepercayaan ini merupakan asas dalam dunia perbankan yang lebih bersifat dan dilandasi dengan adanya suatu hubungan kepercayaan antara nasabah dengan pihak bank. Bentuk kepercayaan ini dapat dilihat dengan keinginan masyarakat atau nasabah yang mempercayakan dana yang dimilikinya untuk di simpan pada bank yaitu dengan tujuan terjaminnya keamanan terhadap dana tersebut.

Selanjutnya dalam asas kepercayaan (*fiduciary principle*), sangat penting untuk meyakinkan bank bahwa nasabah dapat dipercaya sebelum diberikan kredit. Oleh sebab itu, bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit, dimana analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan sehingga bank dapat yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

⁸³ Wawancara dengan Ronald. Jr, Bagian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 20 September 2012.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah lebih aktif dilaksanakan oleh *Front Liner* dan juga oleh bagian Kredit. Adapun Standar Operasional Prosedur terdiri dari:

- 1) Proses pembinaan nasabah.
- 2) Memonitor dan mengevaluasi rekening nasabah.
- 3) Melakukan kunjungan secara berkala.
- 4) Memberikan atensi atau perhatian khusus kepada nasabah pada momen-momen tertentu.
- 5) Memberikan advis kepada nasabah.
- 6) Mengidentifikasi dan mengusulkan upaya-upaya perbaikan bagi debitur yang berpotensi akan bermasalah.

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010, dinyatakan bahwa semua Bank Perkreditan Rakyat tanpa terkecuali mempunyai kewajiban untuk melakukan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Dimana nasabah akan dikelompokkan berdasarkan nilai risiko yang patut menurut bank.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai peran penting yaitu untuk mengurangi risiko. Hal ini diperkuat dengan pendapat Deputy Khusus Investigasi Perbankan Indonesia, Sundari S. Arie M yang menyatakan bahwa, Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau

kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, Prinsip Mengenal Nasabah ini didasari dengan suatu pertimbangan untuk mengurangi tindakan kejahatan pada bank dan menghindari semua risiko yang dapat merugikannya.

Pengelompokan nasabah berdasarkan nilai tingkat risiko ini didalamnya harus dilakukan suatu analisis diantaranya terhadap:

1. Identitas nasabah.
2. Lokasi usaha nasabah.
3. Profil nasabah.
4. Nilai transaksi nasabah.
5. Kegiatan usaha nasabah.
6. Struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, dan
7. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dapat digolongkan kepada nasabah perorangan dan nasabah yang mewakili suatu perusahaan. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah perorangan dengan nasabah yang mewakili perusahaan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari permintaan informasi awal nasabah yaitu:⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Havid Wahyudi, *Funding Officer* pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 21 September 2012.

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah perorangan terdiri dari:

- 1) Nama lengkap.
- 2) Nomor dokumen identitas yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan langsung dokumen tersebut.
- 3) Alamat tempat tinggal yang sesuai dengan kartu identitas.
- 4) Alamat tempat tinggal terbaru, beserta nomor telepon apabila ada.
- 5) Tempat dan Tanggal lahir.
- 6) Kewarganegaraan.
- 7) Pekerjaan.
- 8) Jenis kelamin.
- 9) Status perkawinan.

2. Sedangkan untuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap nasabah perusahaan, Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang harus mengetahui diantaranya:

- 1) Nama dari perusahaan tersebut.
- 2) Nomor izin usaha dari instansi yang berwenang.
- 3) Alamat kedudukan perusahaan.
- 4) Tempat dan Tanggal pendirian perusahaan.
- 5) Bentuk badan hukum perusahaan.
- 6) Sumber dana.

- 7) Tujuan melakukan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan oleh calon nasabah.

Nasabah perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yang dapat digolongkan ke dalam usaha kecil perlu ditambahkan mengenai identitas yaitu adanya spesimen tanda tangan dan kuasa pada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan usaha dengan Bank Perkreditan Rakyat, kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi nasabah yang diwajibkan memilikinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, surat izin tempat usaha serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Nasabah perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yang tidak digolongkan kepada perusahaan usaha mikro dan usaha kecil juga perlu menambahkan:

- 1) Laporan keuangan atau gambaran kegiatan usaha perusahaan.
Adapun kegiatan usaha perusahaan ini terdiri dari informasi kegiatan usaha, profil dari pelanggan, alamat tempat melakukan usaha serta nomor telepon perusahaan.
- 2) Struktur manajemen perusahaan.
- 3) Struktur kepemilikan perusahaan.
- 4) Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan usaha dengan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.

- 5) Adanya akte pendirian/anggaran dasar yang bentuknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan secara garis besar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang meliputi prosedural dalam penerimaan nasabah oleh pegawai bank yang terkait dan pelaksanaan prosedural identifikasi nasabah. Hal ini dilakukan terhadap nasabah yang baru maupun terhadap nasabah yang lama.

Selanjutnya, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu proses pemantauan atau monitoring terhadap nasabah. Hal ini dilakukan secara terus menerus terhadap setiap rekening serta transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah, diutamakan terhadap rekening dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat tinggi dan yang terakhir yaitu Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang wajib untuk melaporkan setiap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah apabila terjadinya suatu kecurigaan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa tujuan yang paling utama dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang adalah untuk memelihara reputasi bank tersebut dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga, dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang harus melakukan antisipasi terhadap semua risiko yang akan terjadi dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah.

Upaya yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu berupa menentukan klausula-klausula yang baku standar perbankan pada umumnya, yang dikenal dengan FDN (Formulir Data Nasabah). Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh nasabah. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dilakukan dengan cara sederhana, dan belum melaksanakan perintah Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 secara menyeluruh, seperti tidak adanya suatu unit khusus yang menentukan dan mengawasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah itu sendiri pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, bahwasanya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang tersebut bertujuan untuk menjaga sektor perbankan dari tindakan kejahatan perbankan serta untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut terdapat beberapa

hambatan. Adapun hambatan secara eksternal yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai berikut:⁸⁵

1. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melihat adanya upaya ketidakjujuran dari nasabah pada saat mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah. Ketidakjujuran dalam mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah banyak terdapat pada sumber-sumber dana yaitu mengenai jumlah rata-rata penghasilan perbulannya. Terhadap permasalahan ini pihak bank mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran sumber dana tersebut.
2. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang menilai masih adanya nasabah yang memiliki pola pikir bahwa pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah tidak diperlukan. Hal ini disebabkan karena nasabah belum mengerti akan manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah tersebut. Sehingga, dibutuhkan upaya ekstra Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang supaya dapat terlaksananya proses Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melihat adanya ketidaknyamanan nasabah terhadap rahasia keuangannya diketahui oleh pihak bank, seperti halnya berkeberatan untuk memberikan slip gaji atau bukti penghasilan perbulannya karena mereka menyimpan dana bukan peminjam dana.

⁸⁵ Wawancara dengan Havid Wahyudi, *Funding Officer* pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 21 September 2012.

4. Dengan timbulnya kebijakan dari Bank Indonesia untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini, Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang mengalami hambatan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah karena adanya anggapan nasabah, pihak bank terlalu aktif dalam menyelidiki masalah keuangan mereka. Namun, pada kenyataannya anggapan tersebut merupakan paradigma yang tidak benar. Oleh karena, pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah adalah suatu kewajiban yang berguna untuk mempertimbangkan risiko yang akan ditanggung oleh bank dan agar bank dapat mengenal dengan siapa melakukan hubungan usaha serta sebagai upaya preventif perbankan terhadap tindak kejahatan di bidang perbankan.
5. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melihat bahwa masih terdapatnya kekurangan perhatian dari nasabah terhadap peraturan Prinsip Mengenal Nasabah. Karena selama nasabah belum memiliki i'tikad baik untuk bekerja sama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, maka selama itu pula bank akan selalu memiliki hambatan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan seutuhnya, sehingga Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Secara umum tidak terdapatnya hambatan secara internal. Namun, dengan melihat dinamika yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang masih terdapatnya kelalaian dan sedikit menyimpang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah seperti yang telah diatur dalam PBI 12/20/PBI/2010 karena adanya target-target yang harus dicapai oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Sedangkan hambatan secara internal lainnya pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu berupa masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) pegawai pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang tersebut terhadap Penerapan Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya rangkap jabatan, tidak adanya unit khusus yang mengawasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah itu sendiri sehingga mengakibatkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, bahwa untuk mendukung keberhasilan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang harus adanya faktor pendukung yaitu:⁸⁶

1. Pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja perbankan secara nasional harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh atau berskala nasional sebagai upaya mendidik masyarakat agar mengerti tentang pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Perlunya peningkatan infrastruktur pendukung dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah seperti halnya sistem teknologi informasi,

⁸⁶ Wawancara dengan Ronald. Jr, Bagian Dana pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, tanggal 22 September 2012.

sehingga dapat mendukung setiap usaha yang dilakukan oleh perbankan secara umumnya dan Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah.

2. Perlunya proses penyesuaian secara berkala terhadap data nasabah sehingga dapat memudahkan pihak bank dalam melakukan pengawasan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Serta perlunya penetapan prosedur audit yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Diperlukannya penerapan identifikasi terhadap risiko perbankan. Perlunya optimalisasi kebijakan dan penerapan dari kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah itu sendiri.
3. Diperlukannya penetapan struktur organisasi yang khusus untuk mengawasi terlaksananya Prinsip Mengenal Nasabah. Pada waktu terdapat calon nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening, petugas bank yang terkait harus menjelaskan kepada nasabah tentang pentingnya pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik dan benar, serta menjelaskan kepada nasabah bahwa dengan mengisi formulir tersebut maka nasabah telah membantu bank untuk melakukan transaksi dengan aman, sehingga pihak bank dapat melihat dan menentukan tingkat risiko dalam setiap transaksi.
4. Adanya kerja sama antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah, serta

adanya training secara berkala yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang tentang Prinsip Mengenal Nasabah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BPR dan BPRS. Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh seorang calon nasabah, yaitu meliputi tahap prosedur penerimaan nasabah, prosedural identifikasi nasabah, proses monitoring terhadap nasabah, dan pelaporan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Adapun kegiatan yang harus dilakukan nasabah yaitu mengisi formulir yang diberikan oleh petugas. Formulir tersebut berisikan antara lain berupa data-data calon nasabah, sumber pendanaan, tujuan pembukaan rekening, dan pernyataan calon nasabah tentang kesediaannya untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh bank dan pernyataan tentang kebenaran dari data-data yang diisikan dalam formulir. Hal di atas juga berlaku untuk nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank tempat melakukan transaksi tersebut dengan jumlah transaksi yang melebihi 100 juta Rupiah. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh petugas bank dalam proses mengenal nasabah adalah

dengan cara melakukan verifikasi identitas calon nasabah, penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah, melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas, dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah, serta menolak calon nasabah yang tidak mematuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diragukan kebenarannya. Akan tetapi, dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang belum melaksanakan secara menyeluruh apa yang ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia.

2. Bahwa hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melihat adanya ketidakjujuran nasabah pada saat mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah. Nasabah merasa ketidaknyamanan dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang menilai bahwa terdapat kurangnya perhatian dari nasabah terhadap peraturan Prinsip Mengenal Nasabah. Nasabah belum sepenuhnya mau untuk bekerja sama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, ada beberapa masukan/saran yang dapat penulis kemukakan dalam hasil penelitian ini yaitu:

1. Agar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka sangat diperlukan upaya peningkatan atau mengoptimalkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut secara internal, yaitu berupa peningkatan kinerja pengawasan terhadap terlaksana atau tidaknya Prinsip Mengenal Nasabah tersebut. Peningkatan upaya kerja sama antara lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank dengan lembaga-lembaga yang terkait yang mengharuskan terlaksananya Prinsip Mengenal Nasabah pada perbankan. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang terhadap penerapan kebijakan tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah seperti Bank Indonesia, hendaknya mengoptimalkan sosialisasi terhadap dunia perbankan secara nasional sehingga dunia perbankan Indonesia menjadi lebih baik lagi dan dapat menunjang perekonomian Indonesia.
2. Dalam menghadapi hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sangat diperlukan adanya suatu kerja sama, yaitu peran pemerintah dan

masyarakat terutama dalam mensosialisasikan pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan membuat masyarakat mengerti dan memberikan doktrin yang benar, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya dilakukan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bank Indonesia atau semua sektor perbankan Indonesia untuk dapat mengadakan seminar atau pelatihan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam menciptakan sektor perbankan yang sehat. Selanjutnya, masih diperlukannya upaya perbaikan sarana dan prasarana serta perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, yaitu dengan melakukan training secara berkala tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bank Indonesia, 2006, *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*, Jakarta, Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.
- Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Frianto Pandia, dkk, 2009, *Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya.
- Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Johanes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung, CV. Utomo.
- Kasmir, 2004, *Pemasaran Bank*, Jakarta, Kencana.